

## **Kendala Program Nagari Tangguh Bencana di Nagari Gunung Rajo Kabupaten Tanah Datar**

**Amelia Putri Wirasari<sup>1</sup>, Zikri Alhadi<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: [ameliaputriwirasari11@gmail.com](mailto:ameliaputriwirasari11@gmail.com), [zikrialhadi@fis.unp.ac.id](mailto:zikrialhadi@fis.unp.ac.id)

### **Abstrak**

Nagari Gunung Rajo Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Nagari yang berada di patahan Sianok dan hal ini menyebabkan Nagari Gunung Rajo menjadi salah satu daerah yang berpotensi mengalami berbagai bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan sebagainya. Kemudian olehnya Nagari Gunung Rajo diterapkan program Nagari Tangguh Bencana. Sehingga penelitian ini bertujuan menelaah secara mendalam dan mendeskripsikan kendala dalam menjalankan Program Nagari Tangguh Bencana. Untuk menjawab tujuan penelitian di atas, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Informan penelitian ini memiliki kriteria subjek substantif dari penerapan program nagari tangguh bencana, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, Sekretaris Wali Nagari Gunung Rajo, Satgas Bencana Nagari Gunung Rajo, Forum Penanggulangan Risiko Bencana Nagari Gunung Rajo dan Masyarakat setempat. Penelitian ini menemukan dua kendala dalam menjalankan program Nagari Tangguh Bencana di Nagari Gunung Rajo, yaitu sumber daya manusia (SDM) belum memadai dan sarana-prasarana yang minim dalam menunjang pembentukan Nagari Tangguh Bencana. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa langkah utama untuk menutupi dua kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas SDM dan melengkapi sarana-prasarana yang dibutuhkan.

**Kata Kunci:** *Nagari Gunung Rajo, Nagari Tangguh Bencana, Kendala Mitigasi, Pemerintah Nagari*

### **Abstract**

Nagari Gunung Rajo Tanah Datar Regency is one of the Nagari located on the Sianok fault and this has caused Nagari Gunung Rajo to become one of the areas that has the potential to experience various natural disasters such as earthquakes, landslides, and so on. Then by him Nagari Gunung Rajo implemented the Nagari Tangguh Bencana program. So that this research aims to study in depth and describe the obstacles in running the Nagari Tangguh Bencana Program. To answer the research objectives above, the research method used is qualitative-descriptive. The informants of this study have substantive subject criteria from the implementation of the disaster resilient nagari

program, namely the Tanah Datar Regency Regional Disaster Management Agency, the Secretary of the Gunung Rajo Nagari Guardian, the Gunung Rajo Nagari Disaster Risk Management Task Force, the Nagari Gunung Rajo Disaster Risk Management Forum and the local community. This research found two obstacles in running the Nagari Tangguh Bencana program in Nagari Gunung Rajo, namely inadequate human resources and minimal infrastructure in supporting the formation of Nagari Tangguh Bencana. Therefore, this study concludes that the main step to cover these two obstacles is to improve the quality of human resources and complete the necessary infrastructure.

**Keywords:** *Nagari Gunung Rajo, Disaster Resilient Nagari, Mitigation Constraints, Nagari Government*

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia terlihat bahwa pemerintah memberi respon yang sangat baik karena sudah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait melalui BNPB yang dibentuk pada tahun 2008 sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana. Salah satu kebijakan BNPB dalam upaya penanggulangan bencana adalah diluncurkannya Program Destana sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Program tersebut ada karena dilatar belakangi oleh tingginya potensi ancaman bencana di Indonesia sehingga sangat diperlukan upaya penanggulangan risiko bencana yang berbasis masyarakat dan memadukannya sebagai bagian dari RPJM Kabupaten/Kota. Destana merupakan salah satu upaya yang diregulasikan untuk meminimalisir risiko bencana melalui basis kemasyarakatan. Upaya pengurangan risiko bencana melalui basis kemasyarakatan merupakan bentuk baru untuk mengurangi dampak negatif dari bencana dan meminimalisir potensi masyarakat rentan, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat sebagai pelaku utama (Balqis, GE, Rifai, M., dan Santoso, MPT., 2021).

Penanganan bencana membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang untuk meminimalkan efek negatif atau kerugian yang mungkin diakibatkannya. Mengacu dari UU No. 24 Tahun 2007, dimaktubkan bahwa kegiatan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab berbagai pihak yakni pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga usaha dan dilaksanakan bersama dengan masyarakat.

Pemerintah menerapkan pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan pemenuhan HAM masyarakat, bukan karena sebatas kewajiban pemerintah atau perubahan paradigma bahwa upaya penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama bagi semua kalangan (Haryoso, A., 2008; 2).

Lebih lanjut, merujuk pada Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012, Destana memiliki artikulasi bahwa desa/kelurahan tangguh bencana diwujudkan untuk

masyarakat agar mempunyai kemampuan adaptasi terhadap bencana secara mandiri, menghadapi berbagai ancaman yang dimunculkan oleh bencana dan pulih bangkit segera dari dampak bencana yang tidak menguntungkan, apabila terdampak bencana. Sebuah desa/kelurahan bisa dikatakan tangguh bencana jika memiliki kemampuan untuk mengetahui potensi bencana di wilayahnya dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proses pengembangan yang dapat berupa lokakarya, pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan pemateri dari BNPB dan BPBD, serta membuat kebijakan dan membangun mitigasi bencana.

Lokasinya yang berada di sepanjang jalur erupsi gunung berapi, Provinsi Sumatera Barat rawan bencana. Kabupaten Tanah Datar terletak di sekitar bukit yang dilintasi oleh sesar aktif, sesar semangka, yang merupakan episentrum utama. Sebagai salah satu Nagari yang berada di lereng gunung merapi, masyarakat Nagari Gunung Rajo memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Atas dasar itu juga Nagari Gunung Rajo ditetapkan sebagai Nagari Tangguh Bencana berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 265 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh sebagai Nagari Tangguh Bencana. Penetapan Nagari Gunung Rajo sebagai Nagari Tangguh Bencana itu disebabkan rawannya daerah tersebut terhadap bencana dan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Kantor Wali Nagari Gunung Rajo, bahwa:

“...Gunung Rajo ditetapkan langsung oleh BNPB sejak tahun 2016 sebagai Nagari Tangguh Bencana dengan mengirim fasilitator karena memiliki potensi terkena bencana, terutama bencana gempa bumi dan longsor karena berada di atas patahan sianok dan dikelilingi oleh dataran tinggi...” (Wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Gunung Rajo pada 14 Desember 2021).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar dan pihak lainnya terlibat dalam melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat, mulai dari mensosialisasikan mitigasi bencana hingga penetapan nagari menjadi nagari tangguh bencana. Nagari Gunung Rajo bertanggung jawab atas penanggulangan bencana gempa bumi dan tanah longsor. Akan tetapi, Nagari Gunung Rajo dalam mengimplementasikan program nagari Tangguh bencana masih ditemukan berbagai permasalahan. Nagari Gunung Rajo telah memiliki satgas bencana dalam penanganan bencana. Namun, hingga saat ini destana Gunung Rajo mengalami permasalahan karena kekurangan sumber daya manusia terakit kebencanaan.

Sebagai daerah rawan bencana Nagari Gunung Rajo dapat dikatakan masih kurang maksimal dalam mitigasi bencana. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya aturan nagari terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana gempa bumi dan longsor yang dapat melanda, sehingga membuat tidak adanya dasar yang mengatur dengan jelas bagaimana hubungan antar semua stakeholder baik itu pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana. Selain itu, tidak ada aturan yang secara khusus berlaku di

nagari dalam hal perencanaan tata ruang atau praktik lain yang akan membantu masyarakat nagari Gunung Rajo menjadi lebih mampu.

Nagari Gunung Rajo sebagai daerah yang sudah menerapkan program destana, memiliki 6 komponen sesuai Perka BNPB No. 1 Tahun 2012, yaitu kelembagaan, perencanaan, legislasi, pendanaan, pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Komponen-komponen tersebut harus berjalan secara optimal dan dikoordinasikan dengan baik sehingga mencapai upaya yang terbaik. Namun berdasarkan berbagai permasalahan yang peneliti kemukakan di atas, artikel ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam menjalankan program nagari tangguh bencana di Nagari Gunung Rajo Kabupaten Tanah Datar. Sehingga artikel ini peneliti konstruksi berdasarkan rumusan masalah “apa kendala penerapan program nagari tangguh bencana di Nagari Gunung Rajo Kabupaten Tanah Datar?”

## **METODE**

Nagari Gunung Rajo, Kabupaten Tanah Datar merupakan Nagari yang masyarakatnya terletak di sesar Sianok yang kemudian memiliki implikasi masyarakat yang rentan terhadap bencana alam; mulai dari gempa bumi, tanah longsor dan bencana serupa lainnya. Skema Nagari Tangguh Bencana kemudian ditetapkan untuk dilaksanakan di Nagari Gunung Rajo. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara menyeluruh dan merinci tantangan yang dihadapi Program Nagari Tangguh Bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif untuk mencapai tujuan penelitian tersebut di atas. (Sugiyono, 2012:9). Penelitian berlokasi di Nagari Gunung Rajo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

Teknik pengambilan informan yang peneliti ambil adalah *purposive sampling*, mengingat informan penelitian ini memiliki kriteria subjek substantif dari penerapan program nagari tangguh bencana, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar, Sekretaris Wali Nagari Gunung Rajo, Satgas Bencana Nagari Gunung Rajo, Forum Penanggulangan Risiko Bencana Nagari Gunung Rajo dan Masyarakat setempat.

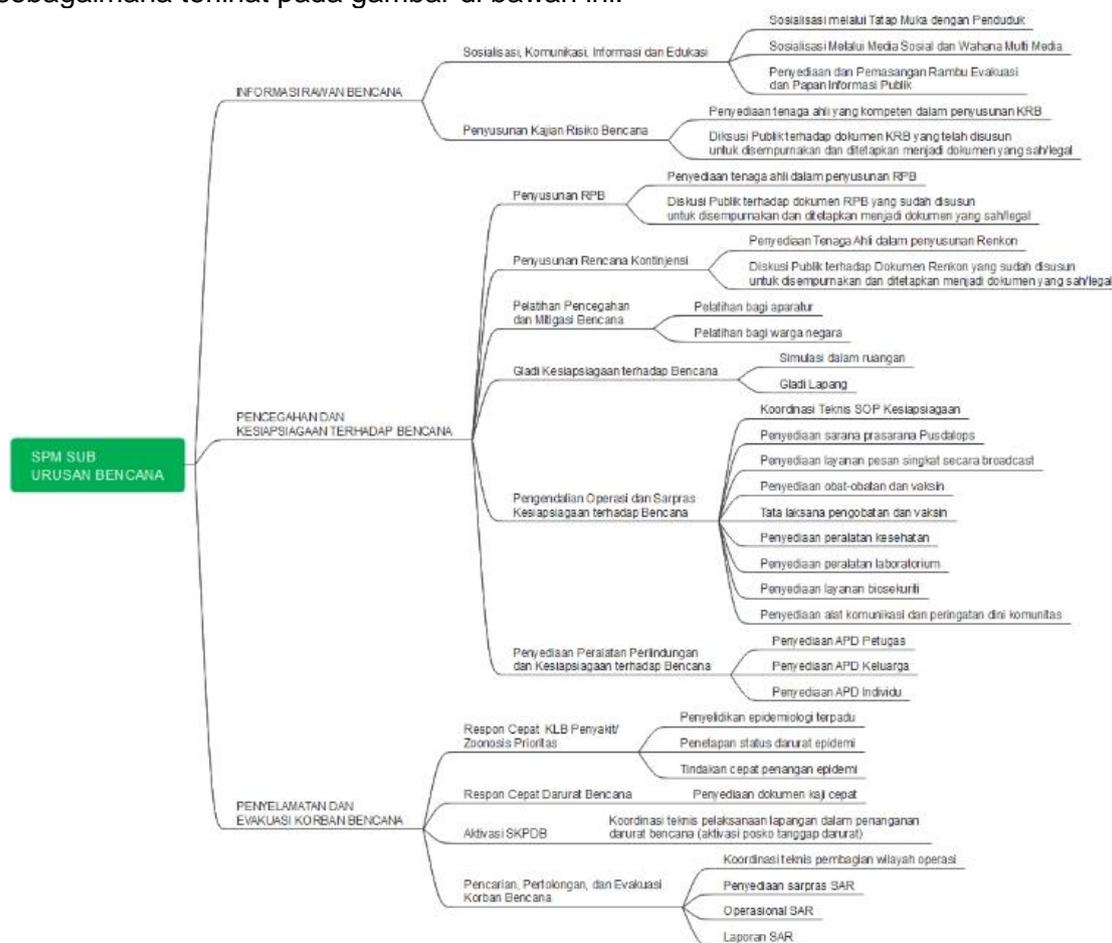
Kemudian pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, studi dokumen (regulasi, artikel/temuan penelitian, dan buku relevan) dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan di atas (Creswell, 2013). Setelah data diperoleh, analisis dilakukan dengan mendeskripsikan temuan yang telah direduksi dan disajikan dalam artikel ini. Sehingga durasi waktu penelitian untuk keseluruhan menghabiskan tiga bulan yang terhitung sejak 19 Juli 2022-19 Oktober 2022.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah di bidang perlindungan masyarakat dan ketentraman serta ketertiban umum adalah penanggulangan bencana. Penyelenggaraan urusan wajib layanan dasar di tingkat daerah tersebut telah dijabarkan dalam aturan yang lebih teknis pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sub-Urusan Bencana, pelaksanaannya diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana.

SPM Sub-Urusan Bencana terdiri dari 3 jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota, yaitu: Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Kegiatan pada tiap-tiap pelayanan dasar ini diturunkan menjadi beberapa sub-kegiatan. Terdapat 12 sub-kegiatan dalam SPM Sub-Urusan Bencana. Berdasarkan kegiatan pelayanan dasarnya, sub-kegiatan tersebut adalah sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1. Struktur Lingkup Layanan pada SPM Sub-Urusan Bencana**  
Sumber: diolah dari Permendagri 101 Tahun 2018

SPM Sub-Urusan Bencana merupakan salah satu layanan dasar yang memiliki kompleksitas karena semua orang terlibat dan memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini. Penanggulangan bencana adalah urusan bersama dan mempengaruhi kehidupan serta penghidupan masyarakat di daerah terdampak. Karakter yang dimiliki oleh SPM Sub-Urusan Bencana antara lain adalah:

1. Lintas sektor, dimana dalam konsep kolaborasi Pentahelix, maka unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media, merupakan pilar utama yang turut menentukan kesuksesan penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah.
2. Rentang waktu layanan yang panjang, dimana pelayanan dasar harus tetap diberikan selama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berdiri.
3. Keragaman kapasitas anggaran dan sumber daya, dimana setiap daerah memiliki kemampuan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang berbeda-beda. Oleh karena itu SPM Sub-Urusan Bencana harus memiliki kemampuan untuk diterapkan di daerah dengan kemampuan terkecil sekalipun.

SPM Sub-Urusan Bencana terdiri dari 12 sub kegiatan yang satu sama lain memiliki keterhubungan yang unik. Jika diamati lebih dalam, maka sesungguhnya struktur layanan pada SPM Sub-Urusan Bencana secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Layanan pokok merupakan jenis sub kegiatan yang menawarkan konten/konsep/standar layanan untuk menjamin bahwa jenis layanan dan kualitas layanan sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan.
2. Layanan langsung, merupakan jenis sub kegiatan yang pelayanannya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nagari, maka kontribusi terhadap pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana kabupaten/kota perlu diprioritaskan pada kelompok layanan langsung, sesuai dengan wewenang pemerintah nagari. Kemudian, berdasarkan temuan penelitian di lapangan, maka kendala dalam menerapkan program Nagari Tangguh Bencana di Nagari Gunung Rajo Kabupaten Tanah Datar terdapat dua poin, yaitu SDM dan sarana prasarana:

### **1. Sumber Daya Manusia (SDM) Belum Memadai**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor *ber-gaining position* tinggi dalam pelaksanaan suatu program dalam mencapai keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan. Sumber daya manusia harus memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika dalam terlaksananya suatu program secara kuantitas sudah terpenuhi, namun apabila dari sisi kualitas dari SDM tersebut masih belum memadai, maka tetap memberikan pengaruh negatif terhadap keberhasilan pencapaian dari suatu program tersebut.

Salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan Program Nagari Tangguh Bencana di Nagari Gunung Rajo Kabupaten Tanah Datar yaitu kurang memadainya

sumber daya manusia. Jumlah anggota aktif satgas bencana kurang lebih 8 orang, sedangkan satgas bencana merupakan salah satu aktor yang berperan dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di nagari. Hal tersebut menjadikannya salah satu komponen penting dalam pelaksanaan program nagari tangguh bencana yang kurang efektif dan konsistensi yang minim dalam perwujudan atas program nagari tangguh bencana yang telah diformulasikan sebelumnya.

Temuan di atas juga menjadi temuan dari penelitian Julius, AM., Widyaningrum, N., Najib A., Aminullah, AA., Syarifah, H., Pratikno, H., Fadlurrahman, I., Adri, K., Suroso, T., Ramadhani, RM., dan Widana, IDKK., (2020) bahwa sumber daya manusia sangat penting dalam melangsungkan program Destana. Lebih lanjut Julius, AM., Widyaningrum, N., Najib A., Aminullah, AA., Syarifah, H., Pratikno, H., Fadlurrahman, I., Adri, K., Suroso, T., Ramadhani, RM., dan Widana, IDKK., menemukan dalam studinya bahwa Desa Gunung Geulis rutin melakukan pelatihan rutin dan berkesinambungan setiap bulan sebagai upaya pengembangan kapasitas SDM terkait penanggulangan bencana.

## **2. Minimnya Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka keberlangsungan pelaksanaan suatu program hingga dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan sebagai pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan terhadap suatu bencana sejak pra bencana, saat bencana terjadi hingga pascaterjadinya bencana.

Sarana prasarana yang dimiliki nagari sebagai pendukung pada program nagari tangguh bencana di Nagari Gunung Rajo masih minim. Sebab, saat terjadinya bencana di lapangan masyarakat bersama satgas hanya mengandalkan tenaga sendiri dan ketersediaan peralatan yang minim. Meski pada akhirnya cara yang diusahakan dapat dikatakan berhasil, namun dengan kondisi sarana prasarana yang minim telah menghambat pelaksanaan program nagari tangguh bencana. Sehingga dapat dilihat bahwa peranan pemerintah dalam penyediaan dan pemenuhan atas sarana prasarana masih kurang untuk menunjang keberhasilan program nagari tangguh bencana. Mengacu dari studi yang dilakukan oleh Salwa, R., dan Alhadi, Z., (2019) bahwa keterbatasan sarana dan prasarana (fasilitas) merupakan kelemahan dari suatu daerah yang rentan bencana.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dan pembahasan artikel ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa kendala pelaksanaan program Nagari Tangguh Bencana di Nagari Gunung Rajo Kabupaten Tanah Datar ada dua, yaitu kurang memadainya sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang kurang. Langkah utama untuk mengatasi kedua tantangan ini adalah dengan meningkatkan standar sumber daya manusia dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balqis, GE, Rifai, M., dan Santoso, MPT.(2021). Efektivitas Program Destana oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Cililitan.*NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 5. Pp. 1120-1128.
- Creswell, J. (2013). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In *Research Design*.
- Haryoso, A. (2008). *Perencanaan Kontijensi Menghadapi Bencana*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Julius, AM., Widyaningrum, N., Najib A., Aminullah, AA., Syarifah, H., Pratikno, H., Fadlurrahman, I., Adri, K., Suroso, T., Ramadhani, RM., dan Widana, IDKK. (2020). Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Gunung Geulis, Sukaraja, Bogor.*Jurnal Swabumi*, Vol.8 No.1, pp. 1-10.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Salwa, R., dan Alhadi, Z. (2019).Evaluasi Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 1, pp. 50-59.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 265 Tahun 2016 Tentang Penetapan Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh sebagai Nagari Tangguh Bencana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.